

BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI

2.1 Sejarah Perusahaan



Gambar 2. 1 Logo Direktorat SMA
(<https://sma.kemdikbud.go.id/logosma>)

Dikutip dari buku Budaya Kerja Direktorat SMA, Direktorat SMA merupakan instansi yang memiliki tugas untuk melaksanakan rumusan dan pelaksanaan kebijakan pada jenjang sekolah menengah atas secara nasional. Pada awal era reformasi tepatnya pada tahun 1999, instansi ini terbentuk secara mandiri ketika dilakukan reorganisasi internal sekaligus penggantian nama dari yang sebelumnya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diganti menjadi Departemen Pendidikan Nasional. Dalam reorganisasi pada saat itu, Direktorat Pendidikan Umum (Dikmenum) diberikan tugas untuk mengelola SMA di mana sebelumnya Dikmenum juga mengelola sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA).

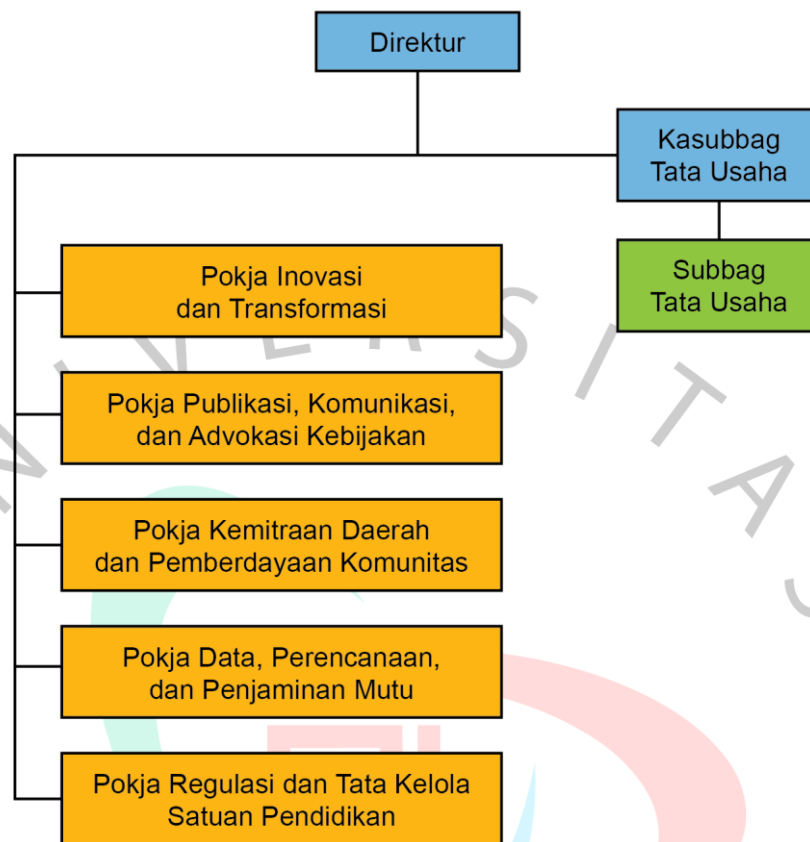
Pada tahun 2005 Departemen Pendidikan Nasional berubah menjadi Kementerian Pendidikan Nasional dan nama Dikmenum berubah menjadi Direktorat Pendidikan SMA. Direktorat ini berada di bawah Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. Pada tahun 2010 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dipecah menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, kemudian Direktorat Sekolah Menengah Atas berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah.

Pada tahun 2015 kembali dilakukan reorganisasi, nama Kementerian Pendidikan Nasional diubah menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lalu kembali diadakan reorganisasi dan penggabungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Direktorat Pembinaan SMA kembali berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Wahyuningsih, Faizah, & Agustin, 2018). Pada tahun 2019 terjadi perubahan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pembinaan SMA dan mengubah nama Direktorat Pembinaan SMA menjadi Direktorat SMA.

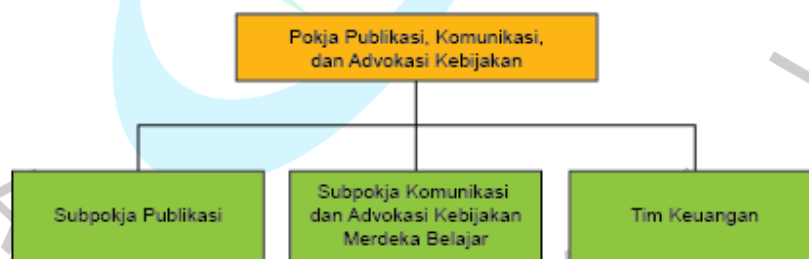
2.2 Struktur Organisasi

Untuk menjalankan visi misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat SMA menyesuaikan struktur organisasi berdasarkan tugas pokok serta fungsi untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Direktur dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubbag) dibantu oleh 5 Koordinator Kelompok Kerja (Kapokja). Pembagian kelompok kerja tersebut dibagi menjadi yakni Pokja Inovasi dan Transformasi, Publikasi, Komunikasi, dan Advokasi Kebijakan, Kemitraan Daerah dan Pemberdayaan Komunitas, Data, Perencanaan, dan Penjamin Mutu, dan Regulasi dan Tata Kelola Satuan Pendidikan.

Berikut merupakan struktur organisasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Direktorat SMA :



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Direktorat SMA



Gambar 2. 3 Struktur Subpokja Publikasi, Komunikasi, dan Advokasi Kebijakan

2.3 Kegiatan Umum Perusahaan

Praktikan melaksanakan Kerja Profesi pada Subpokja Publikasi, yang merupakan bagian dari Pokja Publikasi, Komunikasi, dan Advokasi Kebijakan yang memiliki tugas pokok untuk menganalisis materi publikasi dalam advokasi kebijakan program prioritas Merdeka. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat SMA membagi menjadi 5

Pokja dan 1 Subpokja Tata Usaha yang memiliki tugas dan kegiatan rutin sebagai berikut :

1. Pokja Inovasi dan Transformasi

- Menganalisis dan memahami substansi transformasi SMA, Kurikulum dan Asesmen (IKM), dan Platform Merdeka Mengajar (PMM).
- Menganalisis dan memahami permasalahan dalam transformasi SMA, IKM dan PMM pada tiap Pemerintah Daerah dan Sekolah.
- Menganalisis dan mengidentifikasi praktik baik dalam transformasi SMA, IKM dan PMM pada tiap Pemerintah Daerah dan Sekolah.
- Menyusun materi advokasi transformasi SMA, IKM dan PMM ke Pemerintah Daerah dan Sekolah.
- Melakukan koordinasi dengan unit utama lain di Kemdikbudristek terkait transformasi SMA, IKM dan PMM secara intensif dan berkelanjutan.

2. Pokja Publikasi, Komunikasi, dan Advokasi Kebijakan

- Menganalisis materi publikasi dalam advokasi kebijakan program prioritas Merdeka Belajar.
- Melakukan publikasi dalam advokasi kebijakan program prioritas Merdeka Belajar.
- Melakukan evaluasi efektivitas publikasi kebijakan program prioritas Merdeka Belajar.
- Melakukan koordinasi dengan unit utama lain di Kemdikbudristek terkait publikasi secara intensif dan berkelanjutan.
- Menganalisis dan menyusun strategi komunikasi profesional serta melaksanakan komunikasi profesional dalam advokasi kebijakan program prioritas Merdeka Belajar.

- Melakukan koordinasi dengan unit utama lain di Kemdikbudristek terkait komunikasi dan advokasi kebijakan secara intensif dan berkelanjutan.
3. Pokja Kemitraan Daerah dan Pemberdayaan Komunitas
- Melakukan identifikasi potensi kerja sama dengan komunitas di daerah dalam mendukung program prioritas Merdeka Belajar.
 - Menyusun strategi pelaksanaan kemitraan daerah dan pemberdayaan komunitas dalam mendukung program prioritas Merdeka Belajar.
 - Membina hubungan baik dan profesional dalam Pemerintah Daerah dan komunitas dalam mendukung program prioritas Merdeka Belajar.
 - Melakukan koordinasi dengan unit utama lain di Kemdikbudristek terkait kemitraan daerah dan pemberdayaan komunitas secara intensif dan berkelanjutan.
4. Pokja Data, Perencanaan dan Penjaminan Mutu
- Melakukan pengumpulan data program prioritas Merdeka Belajar dan data Asesmen Nasional (Rapor Pendidikan) di seluruh Pemerintah Daerah.
 - Melakukan analisis data program prioritas Merdeka Belajar dan data Asesmen Nasional (Rapor Pendidikan) di seluruh Pemerintah Daerah.
 - Menyediakan informasi pelaksanaan dan hasil evaluasi program prioritas Merdeka Belajar dan data Asesmen Nasional (Rapor Pendidikan) di seluruh Pemerintah Daerah.
 - Melakukan koordinasi dengan unit utama lain di Kemdikbudristek terkait data, perencanaan dan penjaminan mutu dan Asesmen Nasional (Rapor Pendidikan) secara intensif dan berkelanjutan.
5. Pokja Regulasi dan Tata Kelola Satuan Pendidikan
- Melakukan analisis implementasi dan identifikasi regulasi dalam hal penilaian, pembelajaran tata kelola sarana dan

prasarana SMA untuk mendukung pelaksanaan program prioritas Merdeka Belajar.

- Menyusun usulan regulasi dalam hal penilaian, pembelajaran tata kelola sarana dan prasarana SMA untuk mendukung pelaksanaan program prioritas Merdeka Belajar.
 - Menganalisis substansi tata kelola pendanaan (termasuk *platform* ARKAS, SIPLAH, dan SDS) dan sarana prasarana SMA.
 - Melakukan koordinasi dan advokasi dengan Pemerintah Daerah dalam tata kelola pendanaan (termasuk *platform* ARKAS, SIPLAH, dan SDS) dan sarana prasarana SMA.
6. Pokja Sub Bagian Tata Usaha
- Melakukan urusan perencanaan dan keuangan,
 - Melakukan urusan kepegawaian,
 - Melakukan urusan ketatalaksanaan,
 - Melakukan urusan barang milik negara,
 - Melakukan urusan persuratan dan kearsipan,
 - Melakukan urusan kerumahtanggaan Direktorat.